BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan merupakan unsur yang menentukan dalam suatu penelitian. Karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Oleh karena itu, pengertian kajian pustaka umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian.

Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di samping itu, kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengatahuan yang lebih luas. Berikut merupakan kajian pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian:

A. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni

untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Strong (dalam Djopari, 2008:211) mengemukakan bahwa ”pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi”.

Koentjaraningrat (2002:144) menyebutkan bahwa “masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi”. Ditambahkan oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa “masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya”. Salam (2007:262) mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan advokasi partisipasi melalui mobilisasi.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencakup tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berbagai strategi dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tapi masih saja formulasi untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri Marwoto (2005:108). Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, Konsep ini dikembangkan di Indonesia di dinyatakan sebagai "*inability of the individual to meet basic needs*" Marwoto (2005:97). Sedangkan Chambers (1987:141) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan *(powerlessness)*, kerapuhan *(vulnerability),* kelemahan fisik *(physical weakness),* kemiskinan *(poverty),* dan keterasingan *(isolation).*

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Disamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar harapan

masyarakat untuk mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yang dihadapi. Pembangunan yang bertumpu pada manusia dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, merupakan pilihan strategi pembangunan bagi banyak negara termasuk negara Indonesia.

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990:82) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Kartasasmita (1997:145) menyatakan bahwa keadaan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
b. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu
c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai denganpemahaman mereka.
d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Keikutsertaan masyarakat sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal

sampai tahap akhir. Tidak semua partisipasi atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat, tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk hal yang terakhir tersebut dewasa ini tepatnya sejak perubahan sistem pemerintahan yang *top down* menjadi *bottom up* menjadi tidak berlaku lagi sepanjang perencanaan pembangunan desa. Kalaupun campur tangan dari pihak birokrat ada hanyalah sebatas pada program yang merupakan gerakan masyarakat untuk melaksanakan proyek pembangunan. Uphoff, Cohen, dan Goldsmith dalam Ulifah (2003: 23) membagi partisipasi ke dalam beberapa jenis tahapan, yaitu:

a. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya.
b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.
d. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979:71-74) juga mengemukakan tentang dimensi partisipasi sebagai berikut, pertama adalah *What* yang meliputi di dalamnya pembuatan keputusan, implementasi, pengambilan

keuntungan, dan evaluasi. Kedua *Who* meliputi daerah tempat tinggal, pemerintah lokal atau pemerintahan setempat, dan pihak luar. Dan ketiga *How* yang didalamnya tercakup dasar dari partisipasi, *exient of participation*, serta efek dari partisipasi. Pengertian *What* yakni mengacu pada partisipasi yang meliputi tahap-tahap yang diikuti masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pembangunan yang baik, masyarakat seharusnya dapat terlibat dalam keempat tahapan partisipasi tersebut. Masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana pembangunan, tapi juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil, serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang sudah dicapai. Misalnya dalam pembangunan jalan, masyarakat tidak hanya sebagai pemanfaat saja tetapi mereka perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk membangun jalan dan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut serta dalam mengevaluasinya, karena dalam pembangunan tersebut masyarakatlah yang lebih tahu tentang apa yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sehingga mereka perlu dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan. *"Who"* adalah dalam hal siapa yang berpartisipasi dalam pembangunan, tidak hanya aparat pemerintah saja tetapi juga melibatkan anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, serta petugas asing yang memantau jalannya partisipasi. Dalam pembangunan agar dicapai hasil yang memuaskan, maka keempat pelaku tersebut haruslah bekerja sama dan saling mendukung agar pembangunan dapat berhasil dengan baik.

Sedangkan untuk "*How*" mengacu pada pengertian bahwa partisipasi dilakukan dengan melihat aspek dasar dari partisipasi, bentuk partisipasi, lingkup partisipasi, dan akibat yang ditimbulkan dari partisipasi tersebut. Dalam berpartisipasi tidak hanya melihat akibat apa ditimbulkan dari suati partisipasi, tapi juga harus melihat bagaimana dasar partisipasi tersebut dilakukan. Karena itu partisipasi yang baik tidak hanya melibatkan salah satu pelaku pembangunan, namun juga harus melibatkan semua pelaku pembangunan dalam semua tahap partisipasi serta harus memperhatikan empat aspek tentang bagaiman partisipasi harus dilakukan.

Konsep diatas memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat

berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

4. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Jenis-jenis partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16), meliputi: "(1) Pikiran; (2) Tenaga; (3) Pikiran dan tenaga;(4) Keahlian; (5) Barang; dan (6) Uang". Dari jenis-jenis partisipasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pikiran: pikiran merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

b. Tenaga: merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang

dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

c. Pikiran dan Tenaga: merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.
d. Keahlian: merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
e. Barang: merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
f. Uang: merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

5. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul *"A Ladder of Citizen Participation"*, dalam Panudju (1999:72- 77) bahwa terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, seperti berikut:

a. Manipulasi *(Manipulation)*

Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan "persetujuan" dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai "pembelajaran" atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan "pengumpulan informasi", "hubungan masyarakat" dan "dukungan." Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite,pemegang kekuasaan mengklain bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.

b. Terapi *(Therapy)*

Untuk tingkatan ini, kata "terapi" digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan "penyakit" masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan

antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

c. Pemberian Informasi *(Informing)*

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan *tokenism*. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur yaitu:

1) Pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat;
2) Pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik *(feedback)* dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

d. Konsultasi *(Consultation)*

Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan *(artificial)* karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survei mengenai perilaku, pertemuan antar

tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuesioner.

e. Penentraman *(Placation)*

Strategi penentraman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan:

1) Kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka;
2) Tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

f. Kemitraan *(Partnership)*

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka

yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah:

1) Adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat dimana pemimpinpemimpinnya akuntabel;
2) Pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka;
3) Ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer *(community organizer)* mereka sendiri.

g. Pendelegasian Kekuasaan *(Delegated Power)*

Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-progam pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.

h. Pengawasan Masyarakat *(Citizen Control)*

Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan

(atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau *non participation*. Tingkat 3, 4, dan 5 disebut tingkat penghargaan/tokenisme atau *Degree of Tokenism*. Dan tingkat 6, 7, dan 8 disebut tingkatan kekuatan masyarakat atau *Degree of Citezen Power*.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein

No	**Tangga/Tingkatan Partisipasi**	**Hakekat Kesertaan**	**Tingkatan Pembagian Kekuasaan**
1	Manipulasi (*Manipulation*)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
2	Terapi (*Therapy*)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
3	Pemberitahuan (*Informing*)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
4	Konsultasi (*Consultation*)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
5	Penentraman (*Placation*)	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6	Kemitraan (*Partnership*)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7	Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
8	Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat

(eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. "Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan" (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143). Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1) Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2) Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak

meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

3) Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4) Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5) Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap

program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

B. Tinjauan tentang Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
    1) *Life sustenance :* Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
    2) *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap" orang lain.

3) *Freedom From Survitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu:

a. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
b. *Equity,* hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
c. *Empowerment,* hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
d. *Suistanable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arief (1996: 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kema-tangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih (Arief, 1996:30). Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pem-bangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan

bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam per encanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan

pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

2. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintaha dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu

dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

C. Tinjauan tentang PNPM Mandiri Perdesaan

1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1) PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:11)

2. Tujuan Umum

3) PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:11)

3. Tujuan Khusus

1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel;
3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;

5) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; dan
4) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:11)

4. Prinsip Dasar dan Pendekatan

PNPM Mandiri menekankan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1) Bertumpu pada pembangunan manusia**.** Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
2) Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat

miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung;Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan;

5) Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan;
6) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
7) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
8) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas;
9) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
10) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan

masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan

11) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

PNPM Mandiri melakukan pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

1) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program;
2) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal;
3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif;
4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis; dan
5) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:12-14)

5. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1) Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
   a) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
   b) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa;
   c) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; dan
   d) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2) Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :
   a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
   b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
   c) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;

d) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

e) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan

f) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

3) Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :

a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

f) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;

g) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta

Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

h) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; dan

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:14-15)

6. Kategori Program

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.

2) PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:16)

7. Komponen Program

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

1) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya

2) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif

bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:16-17)

8. Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

1) Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
2) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; dan

4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:17)

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Sutami berjudul "**Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara ".**

   Hasil penelitian menunjukkan adanya antusiasme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan dalam berbagai bentuk. Keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat **kemitraan (partnership),** sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada **tingkat therapy.**

   Penelitian tersebut relevan sebagai rekomendasi penelitian ini, karena memiliki fokus penelitian yang sama yaitu partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

2. Penelitian Trias Yuniar Mediawati berjudul **"Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Studi di Kelurahan Tegalgede, Sumbersari dan Desa Pontang, Ambulu)"**

   Penelitian bersifat deskriptif kualitatif untuk lebih memahami situasi social secara mendalam. Penentuan informan kunci dilakukan secara *purposive* dan *snowball* sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Arnstein untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pada PNPM Mandiri Perkotaan sedangkan rekomendasi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

   Hasil menunjukkan partisipasi masyarakat dalam fenomena prakarsa berada pada tingkatan *placation*. Fenomena pembiayaan berada pada tingkatan *consultation* sedangkan pengambilan keputusan dan mobilisasi tenaga berada pada tingkatan *delegated power*. Untuk Fenomena penyelesaian masalah berada pada tingkatan *partnership*. Rekomendasi yang dirumuskan terkait dengan upaya peningkatan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan pada fenomena prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, mobilisasi tenaga dan penyelesaian masalah.

Penelitian tersebut relevan sebagai rekomendasi penelitian ini, karena memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tingkat/level partisipasi masyarakat dalam Nasional Pemberdayaan. Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

3. Penelitian Karina Swedianti berjudul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) (Kasus Implementasi Program Ekonomi Bergulir Pnpm-Mp Di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor)"**

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan program, sehingga responden dalam penelitian ini adalah peserta program Ekonomi Bergulir PNPM-MP. Program PEB PNPM-MP adalah program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Program PEB PNPM-MP menekankan pada pemberdayaan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2008. Jumlah peserta program adalah 132 orang yang sebagian besar bermatapencaharian di bidang perdagangan. Dalam penelitian ini, resonden terdiri dari 45 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik acak sederhana.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima program berusia produktif, tingkat pendidikannya sedang yaitu lulusan SMP atau MTs, bermata pencaharian sebagai pedagang, memiliki tingkat

pendapatan sedang yaitu berkisar lebih besar dari satu juta dan kurang hingga dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan memiliki motivasi utama terlibat dalam program adalah untuk mengembangkan modal usaha. Tingkat partisipasi peserta program PEB PNPMMP sedang pada tahap perencanaan, tergolong tinggi pada tahap pelaksanaan dan menikmati hasil, sedangkan pada tahap monitoring kegiatan tergolong rendah. Dengan menggunakan uji korelasi diperoleh bahwa tingkat pendidikan responden, tingkat pendapatan, persepsi dan kepemimpinan berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program PEB PNPM-MP. Usia, kesempatan berpartisipasi, serta tingkat keterdedahan informasi tidak berhubungan dengan partisipasi seseorang dalam program PEB PNPM-MP.

Penelitian tersebut relevan sebagai rekomendasi penelitian ini, karena memiliki fokus penelitian yang sama yaitu partisipasi masyarakat dalam Nasional Pemberdayaan. Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menggambarkan alur fikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, berdasarkan judul penelitian tersebut maka kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ini yaitu dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam PNPM Mandiri. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan sampai pengawasan program. Sedangkan PNPM Mandiri merupakan program nasional yang disusun dalam

kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan menentukan program serta tujuan dilaksanakannya program tersebut, partisipsi tersebut bisa dimulai dari tingkat RT/RW atau dukuh dengan cara mendengarkan dan meminta masukan dari segenap warga yang berkaitan dengan perencanaan PNPM Mandiri yang kemudian akan di bahas dalam lingkup desa dengan agenda musyawarah desa (mudes).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan salah satu bentuk kesedian masyarakat untuk melaksanakan program yang telah disepakati bersama. Hubungan pelaksana dan pelaksanaan sangat erat, hal itu mencerminkan tanggung jawab yang telah menjadi kewajiban yang tertanam dalam diri masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memberikan gambaran bahwa program tersebut merupakan hasil yang telah disepakati masyarakat dan akan dilaksanakan oleh semua masyarakat sesuai dengan tujuan utama dari PNPM Mandiri Pedesaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan aktifitas untuk mengawal program dan mengkoreksi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan. Koreksi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kaidah awal dalam proses perencanaan. Pengawasan tidak cukup dilaksanakan oleh lembaga formal tetapi oleh orgnisasi msyarakat, kelompok profesi bahkan anggota masyarakat ikut mengawasi. Hal tersebut dilakukan karena

PNPM MPd merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan membedayakan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan yang meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan, dan meningkatkan mutu hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan berarti ikut mendukung program pemerintah yang nantinya akan terus dikembangakan guna memperbaiki mutu kehidupan yang akan datang.

Lebih jauh kita melihat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) kedalam tingkatannya, partisipasi masyarakat yang menjadi dasar pelaksanaan program memiliki jenjang yang berbeda. Semakin besar partisipasi masyarakat maka semakin besar pula kepuasan dan keberhasilan dalam pembangunan. Dalam penelitian ini ada delapan tingatan yang digunakan sebagai indikator pelaksanaan program, indikator tersebut yaitu: manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penentraman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat.

Dari penjelasan diatas nampak jelas bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari program tersebut guna

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan serta memberikan kemandirian kepada masyarakat dalam melaksanakan kehidupan yang layak.

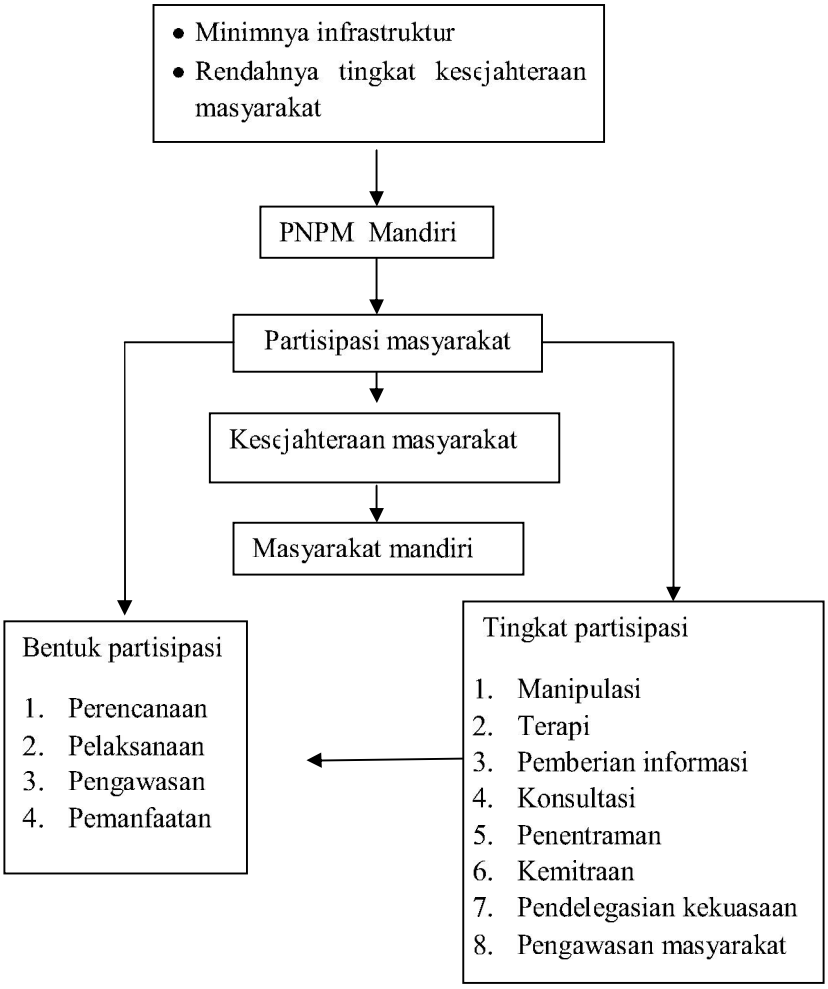

Gambar 1: Kerangka Berfikir

F. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan-pertanyan yang diajuakan dalam penelitian meliputi:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo?

2. Bagaimana hasil yang telah dicapai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan?
4. Apakah hasil yang dicapai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri bermanfaat?
5. Apakah ada peningkatan level partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan?